

Implementasi Demokratisasi Sudan: Kasus Runtuhnya Rezim Pemerintahan Omar Bashir

Aucky Adi Kurniawan, Muhammad Syaprin Zahidi

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

e-mail: auckykurniawan021@webmail.umm.ac.id

Abstract

The Sudanese people's demands led to the fall of Omar Bashir's administration, which had ruled the country for 30 years. Various ethnic conflicts, worsening economic conditions, and the South Sudan referendum were all elements that contributed to the Sudanese people's discontent with Omar Bashir's administration. The role and participation of practically all Sudanese people in mass actions with diverse demands that resulted in the regime's fall were the catalyst for democratization in Sudan, eventually forcing Omar Bashir to step down in 2019. This research used a qualitative approach to explore the situation of democracy in Sudan, as well as the role of the Sudanese people as a whole, in the midst of decades of internal conflict. The theory of democracy and the concept of civil society were used to analyze this situation. The involvement of the Sudanese people in bringing about improvements in the implementation of democracy and the people's ambitions to make Sudan a better and just country was found to be highly essential in this study.

Keywords: Civil Society, Conflict, Democracy, Omar Bashir, Sudan

Abstrak

Runtuhnya rezim Omar Bashir yang telah menjadi pemimpin negara Sudan selama 30 tahun merupakan hasil dari tuntutan masyarakat Sudan. Berbagai konflik etnis, kondisi ekonomi yang memburuk, dan referendum Sudan Selatan menjadi faktor-faktor yang mendorong ketidakpuasan dan keresahan masyarakat Sudan terhadap kepemimpinan Omar Bashir. Peran dan partisipasi dari hampir seluruh masyarakat Sudan dalam gerakan massa dengan berbagai tuntutan yang puncaknya adalah penggulingan rezim menjadi titik awal demokratisasi di Sudan, dan akhirnya membuat Omar Bashir mundur dari kekuasaannya pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif guna fokus membahas situasi dan kondisi demokrasi serta peran dari rakyat Sudan secara keseluruhan di tengah konflik

internal selama beberapa dekade. Teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah teori demokrasi dan konsep civil society. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa peran masyarakat Sudan sangat penting untuk membawa perubahan terhadap implementasi demokrasi serta harapan rakyat untuk membawa Sudan menjadi negara yang lebih baik dan adil.

Kata kunci: Demokrasi, Konflik, Masyarakat Sipil, Omar Bashir, Sudan

Pendahuluan

Sudan adalah sebuah negara di benua Afrika yang memiliki daratan terluas, yakni sekitar 2.505.813 km². Negara Sudan berbatasan langsung dengan negara Ethiopia, Eritrea, dan Laut Merah di sebelah Timur; Afrika Tengah dan Chad di sebelah Barat; Zaire, Uganda, dan Kenya di sebelah Selatan; dan Mesir di sebelah Utara. Pada saat ini, Sudan dipimpin oleh seorang Presiden dan dua orang Wakil Presiden yang bertugas membantu Presiden, persis seperti sistem presidensil. Sudan memiliki 26 negara bagian dengan pusat pemerintahan yang berada di Khartoum (UNDP, no date).

Sudan adalah negara Afrika dengan keragaman etnis paling kompleks. Negara ini memiliki 597 kelompok dan subkelompok etnis, yang telah dikenal sejak lama oleh mayoritas masyarakat di benua Afrika, termasuk komunitas Arab Afrika dan suku seperti Beja dan Nubia. Sekitar 60% penduduk Sudan beragama Islam. Fakta ini dilatarbelakangi oleh sejarah Sudan yang dahulu merupakan wilayah kekuasaan Turki Ottoman. Selain Islam, ada sekitar 25% penganut animisme dan agama tradisional, serta sekitar 5% di antaranya beragama Kristen (Angelo, 2011).

Penyebaran agama Kristen dilakukan oleh misionaris di abad ke-6 melalui Sudan dan Mesir, namun usaha ini terdesak oleh penduduk muslim Nubia sehingga Agama Kristen secara umum tumbuh dan berkembang sampai abad ke-19 di wilayah selatan. Sementara satu abad sebelumnya, Sudan termasuk ke dalam wilayah Kekaisaran Turki Ottoman. Kemudian Inggris muncul sebagai penguasa baru di kawasan Mesir dan Sudan setelah kekaisaran Turki mulai surut (UNDP, no date).

Menurut catatan sejarah, kontak pertama antara masyarakat yang mendiami bagian utara Afrika terjadi pada abad ke-3 SM, tepatnya di wilayah Mesir dengan penduduk ras kulit hitam yang kemudian dikenal sebagai Bilad al-Sudan, atau "Tanah Orang Hitam". Nama 'Sudan' mulai digunakan pertama di Mesir, kemudian di Eropa, karena tidak adanya frasa yang lebih baik untuk menggambarkan wilayah yang luas ini (Ryle et al, 2011).

Nama 'Sudan' juga digunakan oleh bangsa Eropa yang menulis tentang runtuhnya kerajaan yang didirikan oleh Ahmad Al-Mahdi pada tahun 1880-an. Dengan kekalahan Mahdi dan pembentukan pemerintahan Anglo-Mesir pada akhir tahun 1890-an, 'Sudan' akhirnya menjadi unit politik permanen, dengan perbatasannya ditentukan sebagian oleh klaim bersejarah Mesir atas tanah di sekitarnya, dan klaim Inggris, Belgia, Prancis, dan Etiopia atas tanah di sekitarnya (Ryle et al, 2011).

Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1956. Namun kemerdekaan ini tidak langung melahirkan perdamaian dan stabilitas di internal masyarakat Sudan. Di masa awal kemerdekaannya, Sudan dilanda tantangan politik dan ekonomi. Awal kemerdekaan pada tahun 1956 hingga tahun 1985 adalah fase eksplorasi masyarakat Sudan dalam membangun negara demokratis (Chun Leung & Mohd Nor, 2021).

Ismail Al Azhari merupakan Presiden pertama Sudan yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum. Ia berasal dari National Unionist Party (NUP), dan menjabat pada 1 Januari 1956. Terjadinya pemilu pertama ini merupakan hasil dari perjuangan rakyat Sudan mengusir serta mendesak Inggris dan Mesir untuk membuat perjanjian tentang kemerdekaan Sudan. Kudeta yang mendorong Jenderal Ibrahim Abboud menjadi Presiden kedua didasari oleh pertentangan antar kelompok. Kekuasaan itu kemudian diserahkan pada pemerintah di bawah Al Khatim Al Khalifa tahun 1964. Kepemimpinan negara Sudan kemudian diberikan oleh Khalifa kepada pemenang pemilu yaitu Umma Party (UP) National Unionist Party (UNP). Pemerintahan ini kemudian berakhir ketika dilakukannya sebuah kudeta pada bulan Mei 1969 oleh Jenderal Ja'far Nimeiri hingga 1985. Perselisihan antara Utara dan Selatan mulai reda pada tahun 1972 saat Sudan Selatan memperoleh otonomi melalui persetujuan damai Addis Ababa (Berry, 2015).

Pada tahun 1983, hukum Islam mulai diberlakukan di negara Sudan atas keputusan Nimeiri. Namun hal ini mendapat tentangan dari rakyat Sudan Selatan yang mayoritasnya penganut agama Kristen dan Animisme. Kudeta kembali dilakukan pada tahun 1985 oleh Suar El Dahab yang kemudian kekuasaan itu diserahkan pada kandidat pemenang pemilu dari Umma Party (UP) dan Democratic Unionist Party (DPC). Peristiwa ini menjadikan Sudan kembali menganut sistem pemerintahan parlementer untuk kedua kalinya.

Pemerintahan koalisi tidak dapat menyelesaikan konflik politik dan memadamkan pemberontakan rakyat Sudan Selatan pimpinan John Garang yang nyaris menghancurkan Sudan. Brigjen Omar Hassan Ahmed Al Bashir yang didukung oleh sejumlah perwira muda serta National Islamic Front (NIF) pimpinan Dr. Hassan Abdalla

Turabi melakukan kudeta pada 30 Juni 1989. Kudeta tersebut menghantar Omer Hassan Ahmed Al Bashir ke puncak kekuasaan (Berry, 2015).

Meski sejak kemerdekaan di tahun 1956, Sudan mengalami pasang surut kekacauan politik dan militer, namun Omar Bashir berhasil memimpin negara Sudan selama 30 tahun dengan merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin generasi baru yang berbasis aliansi antara islamis dengan militer. Hanya saja, pada akhirnya Omar Bashir tidak mampu mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden setelah terbukti memimpin negara dengan cara diktator selama 30 tahun berkuasa. (Wahiduddin, 2020).

Bashir terguling dari tampuk kekuasaannya pada 11 April 2019, setelah hampir enam bulan protes massal tanpa henti terhadap pemerintah. Kesengsaraan sosial dan ekonomi selama bertahun-tahun di Sudan memuncak dalam unjuk rasa pada 19 Desember 2018, ketika penghentian subsidi gandum dan bensin memicu kemarahan publik terhadap Bashir.

Namun demikian, meski kekuasaan Bashir telah tumbang, demonstrasi terus berlanjut. Hal ini karena kudeta tidak serta merta membawa perubahan apabila kekuasaan selanjutnya tetap dilanjutkan oleh diktator. Situasi politik seperti ini bukan hal baru bagi masyarakat Sudan. Sebelumnya, pemberontakan massa telah menjatuhkan penguasa militer dua kali, yaitu pada tahun 1964 dan 1985. Pertikaian politik dan korupsi, perang dan bencana ekonomi menyusul dalam kedua kasus tersebut, serta kudeta militer dan penguasa militer lainnya (Bassil & Zhang, 2021). Untuk mengatasi hal tersebut, sebanyak 22 Partai politik dan organisasi sosial Sudan berkumpul pada Januari 2019 dan bersatu dalam gerakan sosial terpadu dengan tujuan membentuk pemerintahan baru Sudan melalui pembentukan The Force of Freedom and Change (FFC) (Declaration of Freedom and Change, 2019 dalam Bassil & Zhang, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perjalanan demokratisasi di negara Sudan yang selama 30 tahun dipimpin oleh Omar Bashir yang otoriter, hingga mencapai titik penggulingan atau kudeta terhadap Bashir atas dasar keinginan masyarakat yang bergerak secara massif. Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi demokratisasi Sudan pada studi kasus runtuhnya rezim pemerintahan Omar Bashir?”

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian pertama adalah “Sudan’s Uprising: The Fall of a Dictator” yang ditulis oleh Mai Hassan dan Ahmed Kodouda (2019). Di mana pada jurnal ini mereka mengungkapkan bahwa aksi protes dari masyarakat Sudan bukanlah hal baru bagi Omar Bashir. Hassan dan Kodouda memaparkan bahwa Bashir memprioritaskan membeli loyalitas aparatus keamanan daripada mempertahankan patronase kepada partai yang berkuasa maupun

masyarakat Sudan. Untuk menyatukan rezim pribadinya, Bashir mengizinkan pasukan keamanan untuk mengamankan akses ke aliran pendapatan independen. Selama tiga dekade pemerintahan Bashir, banyak ketidakpuasan rakyat Sudan yang akhirnya dimanifestasikan menjadi pemberontakan yang sebagian besar dilancarkan oleh penduduk pedesaan yang terpinggirkan.

Dalam penelitian Hasan dan Kodouda (2019), diungkapkan bahwa awalnya, rezim Bashir sengaja melemahkan masyarakat sipil (civil society) di perkotaan. Dengan melarang partai politik, membubarkan serikat pekerja, dan membubarkan Lembaga masyarakat populer informal yang memobilisasi penduduk di sekitar dan telah memainkan peran dalam revolusi masa lalu. Para pemimpin masyarakat sipil dan partai-partai oposisi memanfaatkan gelombang ketidakpuasan rakyat akan kediktatoran Bashir ini. Sehingga akhirnya terjadi protes terbesar oleh masyarakat sipil yang menandai titik balik demokratisasi Sudan. Penelitian Hasan dan Kodouda percaya bahwa protes tersebut membuktikan masyarakat sipil Sudan bersedia menanggapi seruan untuk protes politik secara eksplisit.

Pada laporan penelitian CMI yang ditulis oleh Munzoul A. M. Assal (2016), dengan judul *"Civil society and peace building in Sudan: A critical look"*, dikatakan bahwa peran organisasi masyarakat sipil dalam proses menciptakan perdamaian dan pembangunan perdamaian (*peace making and peace building*) cukup signifikan, termasuk dalam kasus Sudan. Assal memaparkan bahwa ketika pihak-pihak yang berkonflik menandatangi kesepakatan damai, organisasi masyarakat sipillah yang pertama-tama melakukan implementasi kesepakatan damai tersebut. Meski begitu, Assal tidak mengingkari fakta bahwa organisasi masyarakat sipil mungkin memiliki peran negatif atau bahkan mungkin menjadi salah satu pihak dalam peta konflik yang berlangsung. Maka, penting untuk menyoroti contoh-contoh di mana mereka secara aktif terlibat dan tidak dilibatkan dalam upaya pembangunan perdamaian.

Pada penelitian berjudul *"Omar Al-Bashir: his Governance Crisis and the Outbreak of Revolution in Sudan"* yang dibuat oleh Leung dan Nor (2021), mereka menyimpulkan bahwa Omar Bashir tidak jatuh oleh revolusi yang digalakan masyarakat sipil Sudan semata, namun juga disebabkan oleh pemerintahannya yang lemah. Dia tidak tahu pentingnya kerukunan sosial. Omar Bashir juga gagal memahami kebebasan hak asasi manusia, yang merupakan pilar penting bagi masyarakat sipil yang matang dan berkembang dengan baik. Dia hanya ingin memonopoli kekuatan politik sendiri. Dia tidak mengizinkan orang untuk menantangnya, jika tidak orang akan menghadapi pengadilan politik, penjara atau bahkan hukuman mati.

Leung dan Nor (2021) memaparkan bahwa pemerintahan diktator yang dipimpin oleh Bashir memiliki cara-cara pengendalian masyarakat sipil Sudan yang cukup multidimensi. Di mana agar dapat menjamin keamanan dominan yang mutlak dan akses kekuasaan penuh atas rakyat, Bashir memahami pentingnya mendapatkan legitimasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memilih untuk menipu orang-orang. Yang mana kecurangan terang-terangan Bashir terlihat pada proses pemilihan umum di Sudan. Bashir menghapuskan konsep pemilu yang demokratis, transparan, dan adil. Dia hanya menganggap posisi presiden dan jumlah kursi parlemen yang dikontrol sebagai alat politiknya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Sehingga masyarakat sipil Sudan tidak lagi benar-benar merasakan demokrasi yang adil.

Dari sejumlah literatur di atas terlihat bahwa literatur ketiga memiliki hasil pandangan yang berbeda mengenai peran masyarakat sipil bagi keruntuhan rezim Basir. Namun, kedua penelitian sebelumnya sepakat bahwa gerakan masyarakat sipil merupakan kunci penting dalam meruntuhkan rezim Omar Bashir. Terkait hal itu, penulis melihat kesempatan untuk mencoba menelisik kembali peran masyarakat sipil dalam menjatuhkan rezim Bashir serta bagaimana usaha masyarakat sipil dalam mempertahankan demokrasi tersebut.

Sementara itu, artikel ini memiliki fokus untuk menganalisis fenomena jatuhnya rezim Omar Bashir sebagai proses demokratisasi yang terjadi di Sudan. Penelitian ini juga menitikberatkan pada peran masyarakat dalam penyelesaian konflik untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan demokrasi di Sudan. Selain itu, penelitian ini mengambil rentang waktu mengenai konflik Sudan sebelum dan setelah referendum untuk memberi gambaran tentang bagaimana peran masyarakat dalam konflik tersebut. Rentang waktu penelitian ini dimulai dari tahun 1989 sampai 2019 guna mengetahui sepak terjang dan gaya kepemimpinan Omar Bashir serta situasi negara di bawah rezim yang ia pimpin selama 30 tahun. Namun, pokok utama pembahasan penelitian ini berfokus dari rentang waktu tahun 2011 setelah Sudan Selatan merdeka dan tahun 2019 saat Omar Bashir digulingkan dari jabatannya.

Nazir (1988:84) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam status kelompok manusia, objek atau sebuah kondisi peristiwa. Penjelasan dituliskan, digambarkan, atau dilukiskan secara sistematis dan rinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Rukajat, 2018). Sementara menurut Whitney (1960:160), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Dalam mengumpulkan data, penitian ini akan menggunakan metode *library research*. Di mana data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, dan portal berita resmi baik secara langsung maupun melalui internet (*daring*) yang berkaitan dengan topik penelitian. Lalu nantinya penelitian ini akan menganalisa dengan Teknik reduksi data, yaitu meringkas data yang ada dan disesuaikan dengan tema. Lalu data disajikan dengan menyusun sekumpulan informasi sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peristiwa runtuhnya rezim Omar Bashir dan bagaimana peran masyarakat sebagai bagian dari instrumen demokrasi dalam sebuah negara secara terperinci dan mendalam.

Teori Demokrasi dan *Civil Society*

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat sebagai tumpuan utama dalam menyelenggarakan sebuah negara. Demokrasi telah diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia. Demokrasi digunakan sebagai mekanisme penyelenggaraan negara karena dua alasan. Pertama, sebagian besar negara menjadikan demokrasi sebagai nilai inti (core value) pemerintahan negara. Kedua, demokrasi telah memberikan pedoman yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep demokrasi muncul sebagai akibat dari tumbuhnya paradigma negara kontemporer, yang menjadikan konstitusi sebagai pembela sistem demokrasi. Satu orang (one man), satu suara (one voice), dan satu nilai (one values) berorientasi kuantitatif yang mendukung suara mayoritas sebagai hal utama dalam pembentukan prinsip-prinsip bernegara (Sulisworo & Wahyuningsih, 2016).

Hak warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal dengan istilah "kebebasan berekspresi". Sebagai turunannya, masyarakat memiliki pilihan untuk berserikat dan berkumpul, serta bergabung dengan kelompok politik-sosial demi menyuarakan pendapatnya. Keterlibatan aktif masyarakat Sudan dapat dianalisis dengan melihat konflik di negara tersebut. Diawali dari kudeta pada tahun 1989 dan berkuasa selama 30 tahun hingga 2019, Omar Bashir menetapkan hukum Islam yang mendiskriminasi masyarakat di Sudan Selatan, yang sebagian besar beragama Kristen dan Animisme. Ketidakpuasan masyarakat Sudan Selatan terhadap kebijakan Bashir yang diskriminatif dan otoriter, serta perlakuan bias yang diterima oleh masyarakat Sudan Selatan, akhirnya memicu pada tuntutan pemisahan diri. Referendum dan pembentukan Negara Sudan Selatan pada 9 Juli 2011, menunjukkan bahwa gagasan demokrasi tersebut telah muncul dan diterapkan di Sudan, yang mengartikan bahwa negara tersebut siap untuk menjadi sebuah negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi (Haris, 2020).

Civil Society adalah masyarakat yang mandiri dan teratur. Hal ini penting karena melalui keteraturan dan kemandirian dalam aktivitas sosial bermasyarakat, individu dapat meningkatkan posisinya di level negara dengan membentuk kelompok independen seperti asosiasi, organisasi, dan pengelompokan di ruang publik yang bebas. Sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung atas sistem pemerintahan. Civil society – atau dikenal juga dengan sebutan “Masyarakat madani” – juga merupakan pengertian yang mengacu pada masyarakat yang mampu maju tanpa campur tangan negara. Konsep ini juga terkait dengan gagasan demokrasi, karena jenis kebebasan ini hanya dapat berkembang di lingkungan yang demokratis. Ada banyak sekali perspektif untuk memahami konsep civil society, dan dalam hal ini merupakan perkembangan yang dinamis sesuai ideologi dan kepentingan (Nurcholis Madjid, 1996).

Sudan di masa pimpinan Omar Bashir yang otoriter selama 30 tahun dianggap gagal memperbaiki situasi negara tersebut. Akibatnya, muncul beberapa gerakan oposisi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Runtuhnya pemerintahan ini tidak serta merta menyatukan negara Sudan. Organisasi oposisi transisi Sudan mulai berkembang, yang mengarah ke de-Islamisasi negara Sudan. Organisasi oposisi di Sudan memiliki tuntutan ideologis dan melawan pemerintah otoriter melalui jalur kekerasan yakni angkat senjata untuk menyatakan ketidakpuasannya (grievance).

Tiga faksi oposisi pemerintah di Sudan adalah Justice and Equality Movement (JEM), Minni Minawi's Sudan Liberation Army (SLA), berasal dari bagian barat Darfur, The Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N) dengan Malik Agar sebagai pimpinannya dan bertempat di wilayah Kordofan Selatan dan Nil Biru. MEMO (Middle Eastern Monitor) menyatakan bahwa sejak pemberontakan pada tahun 2003, terdapat 300.000 korban jiwa dan 2,5 juta masyarakat yang menjadi pengungsi (Haris, 2020).

Teori Demokrasi dan konsep Civil Society digunakan untuk dapat menganalisis tentang bagaimana peran masyarakat dalam menggulingkan rezim Omar Bashir sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi di negara Sudan. Hal ini karena masyarakat adalah aktor utama dalam teori Demokrasi, dan kehendak masyarakat mempengaruhi pengambilan kebijakan, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Sejarah Berdirinya Sudan

Republic of Sudan merupakan nama resmi dari negara Sudan, sebuah negara dengan wilayah kedaulatan yang besar di daerah timur laut Afrika. Terletak di antara 4° dan 23° LU serta 22° dan 38° BT dengan luas wilayah Sudan sekitar 1 juta mil persegi, Sudan berbatasan dengan Afrika Tengah dan Chad di bagian Barat; Libya dan Mesir di bagian Utara; Ethiopia dan Eritrea di bagian Timur; serta Kenya, Uganda dan Kongo dibagian Selatan.

Tanggal 1 Januari 1956 adalah hari kemerdekaan negara Sudan. Dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa yang tersebar di area seluas 2,5 juta km², Sudan memiliki keragaman etnis yang kompleks. Ada sekitar 56 kelompok etnis yang terbagi lagi ke dalam 597 sub-etnis, dengan 115 bahasa dan dialek. Penduduk Sudan mayoritas beragama Islam dengan persentase sebesar 60%, terdapat pula masyarakat yang menganut animisme dan agama tradisional setempat sebanyak 25%, dan Katolik sebanyak 15%. Kota-kota besar yang terdapat di negara Sudan antara lain: Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Wad Medani, Atbara, dan Juba (Angelo, 2011).

Era kolonialisme di Sudan berawal dari masuknya Mesir ke wilayah Sudan pada abad ke-19. Ketika itu, warga berkulit hitam dari Sudan Selatan seringkali dianggap dan dijadikan sebagai budak. Inilah yang menciptakan kesenjangan antara wilayah Selatan dan Utara. Hal ini kemudian diperparah saat masuknya era kolonialisme Inggris, dimana aksi diskriminasi tersebut terus berlanjut.

Penduduk Sudan dipisahkan menjadi dua wilayah berdasarkan agama dan etnis: Sudan Utara dan Sudan Selatan. Bagian utara mayoritas Muslim, sementara bagian selatan memiliki populasi Kristen dan Animisme keturunan Afrika. Pada abad ke-9, wilayah Sudan menjadi bagian dari wilayah Kekhalifahan Ottoman. Wewenang pengelolaannya, diberikan kepada Mesir yang ketika itu juga menjadi bagian dari Kekhalifahan Ottoman.

Dominasi Inggris mulai berlangsung pada tahun 1896, setelah berhasil menaklukkan Sudan dengan cara bekerja sama dengan Mesir melalui perjanjian yang dilakukan pada bulan Januari 1899. Inggris kemudian mendirikan pemerintahan dengan dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif. Peraturan yang dirilis tahun 1922 menjelaskan bahwa Sudan Selatan ditetapkan sebagai wilayah terpisah dan terisolir. Sejak saat itu Inggris tidak memperbolehkan masyarakat Sudan Utara mengunjungi Sudan Selatan untuk keperluan apapun agar mengurangi interaksi di antara penduduk kedua wilayah (Adnan, 2006).

Mesir berkata bahwa Sudan sebenarnya bisa menentukan nasib mereka sendiri untuk membuat keputusan perihal pemerintahan. Kemudian Mesir membangkitkan jiwa nasionalisme Sudan, dengan harapan Sudan pada akhirnya memutuskan untuk bergabung ke Mesir.

Mesir meyakinkan bahwa Inggris bisa diusir dari Sudan. Hingga akhirnya tanggal 12 januari 1953, Inggris dan Mesir membuat kesepakatan untuk memberi Sudan waktu dalam memutuskan untuk merdeka atau bergabung dengan Mesir. Pemilihan umum diadakan pada masa transisi dan Ismail Al Azhari keluar sebagai pemenang dan menjabat sebagai perdana menteri Sudan. Di awal masa jabatannya, Ismail ingin punya keinginan

untuk bergabung dengan Mesir, namun keputusan akhirnya adalah Sudan menjadi negara sendiri. Inggris memberikan kemerdekaan pada Sudan pada tanggal 1 Januari 1956 (Adnan, 2006).

Profil Omar Bashir

Omar Hassan Ahmad al-Bashir lahir pada tanggal 1 Januari 1944, di Hosh Bannaga, Sudan. Pendidikan dasar ditempuh oleh Omar di Hosh Bannaga. Kemudian setelah lulus ia pindah ke Khartoum untuk menyelesaikan pendidikan menengah di sana. Bashir diketahui pernah dua kali menikah. Pernikahan pertama adalah dengan sepupunya sendiri Bernama Fatima Khalid. Kemudian ia menikah untuk yang kedua kali dengan seorang wanita bernama Widad Babiker Omer (DW Indonesia, 2008).

Di tahun 1960, Omar Bashir bergabung dengan Angkatan Darat Sudan setelah belajar di Akademi Militer Mesir, Kairo. Sebagai lulusan dari Akademi Militer Sudan di Khartoum, pada tahun 1973, Omar Bashir mengikuti perang Yom Kippur melawan Israel. Dua tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1975, ia dikirim ke Uni Emirat Arab sebagai Atase Militer dan naik jabatan sebagai komandan pada tahun 1981. Omar kemudian melakukan kudeta pada 30 Juni 1989 dan memperkenalkan hukum Islam untuk diimplementasikan dalam skala nasional. Bashir menjalin aliansi dengan Hasan al-Turabi, pemimpin Front Islam Nasional dan membuat lembaga khusus di Sudan utara yang fokus pada hukum syariah Islam (DW Indonesia, 2008).

Omar mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Presiden Sudan tanggal 16 Oktober 1993 yang disusul dengan pembubaran Dewan Komando Revolucioner dengan dalih kepentingan dan keselamatan nasional. Peristiwa tersebut menjadi penanda bahwa Omar Bashir memiliki kekuatan penuh untuk mengatur lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Langkah pertama yang ia lakukan sebagai presiden adalah dengan membuat mata uang yang disebut Dinar Sudan sebagai pengganti Pound Sudan yang nilainya hilang sebesar 90% selama terjadinya revolusi. Kebijakan yang dikeluarkan ini ternyata sangat ditentang oleh Amerika Serikat. Konstitusi baru yang dibentuk oleh Omar mulai diberlakukan pada tahun 1998. Meskipun sempat memiliki afiliasi dengan Turabi, Omar Bashir mengirim pasukan tank ke parlemen untuk menggulingkan Hassan al-Turabi yang pada saat itu menjadi ketua parlemen (DW Indonesia, 2008).

Omar ditempatkan dalam daftar lima besar diktator paling keji pada tahun 2007 atas tuduhan genosida dan kasus pelanggaran HAM berat lainnya terhadap penduduk Darfur di wilayah Sudan Selatan. Tudingan tersebut ditepis dan ia menegaskan bahwa Darfur merupakan masalah internal Sudan. Omar dituding mempertahankan status

serta posisinya untuk menguasai sumber daya dan kekayaan alam Sudan seperti minyak dan gas bumi, emas, serta berlian. Pada akhir 1990 Amerika Serikat melabeli Sudan sebagai pusat kejahatan dan kriminal karena pemerintah Sudan memberikan perlindungan atau suaka terhadap pelaku atau jaringan teroris seperti Osama Bin Laden (DW Indonesia, 2020).

Gerakan Masyarakat Melawan Rezim Omar Bashir

Pada Desember 2018, pemerintahan yang dipimpin oleh Bashir mencoba untuk mencegah keruntuhan ekonomi yang disebabkan oleh sanksi AS selama bertahun-tahun serta hilangnya pendapatan dari industri perminyakan dengan memberlakukan langkah-langkah penghematan darurat dan devaluasi mata uang yang tajam. Pemotongan subsidi roti dan bahan bakar memicu demonstrasi akibat biaya kehidupan sehari-hari yang meningkat tajam. Kemarahan masyarakat Sudan pun segera menyebar ke ibu kota, Khartoum. Protes tersebut kemudian terus meluas. Selain itu, terdapat puluhan pengunjuk rasa yang tidak bersalah menjadi korban dan dibunuh oleh pasukan keamanan Sudan dalam tindakan kekerasan mereka terhadap peserta protes (BBC News, 2019).

Protes yang dipicu pada bulan Desember 2018 memang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang pokok, akan tetapi tuntutan warga Sudan juga menunjukkan keinginan yang mendalam untuk penggantian rezim Bashir. Ratusan ribu masyarakat sipil Sudan menghabiskan waktu di jalan-jalan Khartoum, bernyanyi, menari dan melambaikan spanduk bertuliskan slogan-slogan penuh harapan yang menyerukan pembangunan kembali negara mereka. Bashir sendiri telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di wilayah Darfur dan telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Setahun kemudian, pada 19 Desember 2019, kembali muncul protes oleh masyarakat sosial di Sudan, yang diakibatkan oleh kenaikan harga roti menjadi tiga kali lipat. Hal ini memicu efek domino protes di seluruh negeri, termasuk di bekas kubu partai yang berkuasa. Protes ini menjadi pemantik awal mayarakat Sudan menjadi lebih berani setelah menahan rasa frustasi selama 30 tahun kepemimpinan Omar Bashir yang otoriter dan penuh dengan korupsi masal serta aparat keamanan yang begitu represif. Protes yang dipimpin masyarakat sipil terus berlanjut meskipun mantan Presiden Omar al-Bashir mendeklarasikan keadaan darurat pada 22 Februari 2019, ketika ia membubarkan pemerintah nasional dan regional, serta menggantinya dengan perwira militer dan keamanan (Ayin, 2019).

Penindasan oleh pemerintahan diktator yang dipimpin oleh Bashir terhadap masyarakat sipil dan kesalahan penanganan krisis ekonomi yang buruk telah mendorong

banyak sekali jumlah protes oleh warga Sudan. Hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bergabung dengan gerakan masyarakat sipil muda yang terorganisir untuk menyerukan ungkapan idiomatik, yaitu “Tasgut Bas” yang berarti “Musim Gugur, itu saja”.

Berbekal media sosial dan populasi besar yang tidak puas dan rela berkorban untuk perubahan, masyarakat sipil membentuk Lembaga sosial Sudan Professionals Association atau Asosiasi Profesional Sudan (SPA). SPA yang merupakan NGO baru inilah yang nantinya memainkan peran utama dalam penggulingan Bashir yang berhasil selamat dari beberapa pemberontakan dan surat perintah internasional untuk penangkapannya.

Salah satu pencapaian terbesar Asosiasi Profesional Sudan (SPA) dalam perjuangan untuk menggulingkan Bashir adalah menggabungkan berbagai kelompok masyarakat sipil bersama-sama. Koordinasi dan kolaborasi di bawah SPA dimungkinkan karena perluasan dan akses ke ranah digital. Dengan disiplin dan tekad yang luar biasa, SPA telah berhasil memobilisasi sebagian besar masyarakat sipil Sudan, yang jumlahnya lebih besar daripada upaya-upaya sebelumnya, untuk memaksa jatuh seorang diktator yang telah berkuasa selama tiga dekade. (Ayin, 2019).

Mengingat tindakan keras terhadap masyarakat sipil terorganisir di Sudan oleh aparat militer di bawah pemerintahan Bashir, masyarakat sipil Sudan pun mulai beroperasi di luar peraturan resmi negara. Dalam pengaturan ini, kelompok-kelompok sipil seperti Jaringan Jurnalis Sudan, Komite Dokter Sudan, dan Asosiasi Pengacara Darfur pun muncul dan berkembang dengan legitimasi publik melalui keanggotaan dan prestasi daripada persetujuan pemerintah yang otoriter. Kesemena-menaan partai berkuasa di bawah rezim Bashir yang tidak bertanggung jawab kepada warga Sudan menyebabkan peningkatan dukungan publik pada gerakan masyarakat sipil dan NGO.

Gerakan masyarakat sipil terus digalakan di seluruh wilayah Sudan dengan bantuan komando oleh beberapa lembaga yang cukup berpengaruh. Contohnya adalah badan The Forces of Freedom and Change (FFC), bersama koalisi partai politik oposisi, pemberontak bersenjata, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, mereka memimpin gerakan protes terhadap Omar Bashir pada tahun 2018 dan 2019. Lembaga FFC mendapatkan dukungan kuat dari Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sehingga melahirkan gerakan dengan organisasi yang kuat, serta mampu menegosiasikan pakta dengan militer (Grewal, 2021).

Masyarakat sipil Sudan menuntut sistem politik dengan pengaturan konstitusional yang nantinya akan mewujudkan keadilan sejati serta membangun

perdamaian dan stabilitas yang langgeng. Langkah ini diharapkan bisa membuka jalan bagi pemerintahan demokratis dan pemerintahan sipil sepenuhnya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa harus ada pengorbanan yang dibayarkan untuk mewujudkan sistem demokrasi yang dicita-citakan. Akibat protes pro-demokrasi, ratusan warga telah tewas, ribuan warga terluka atau bahkan cacat, dan ada ratusan warga telah ditangkap oleh militer saat berjalanannya gerakan protes. Selain pembunuhan, aparat militer secara sistematis menggunakan penyiksaan dan pemerkosaan sebagai senjata untuk mematahkan semangat perlawanan sipil.

Organisasi lain yang mengkomandoi Gerakan masyarakat sipil di Sudan adalah Komite resistensi lingkungan (NRCs) yang terdiri dari aktivis dan unsur warga negara lainnya untuk membahas kebutuhan masyarakat serta mengatur advokasi. NRC pertama kali muncul pada protes yang terjadi September 2013. Ketika itu mereka bertindak sebagai oposisi yang terorganisir berdasarkan jaringan lingkungan di Kota Khartoum. Meski demonstrasi tahun 2013 berhasil ditumpas, beberapa NRC di kawasan Kota Omdurman bertahan dan terus berfungsi sebagai wahana kampanye isu-isu lokal. Kelompok inti NRC kemudian mengintensifkan kerja mereka pada tahun 2016 dan 2017, baik untuk ekspansi lokal maupun untuk mendukung pembentukan unit serupa di lingkungan lain yang dapat bertindak secara mandiri (Marovic dan Hayder, 2022).

NRC menarik orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam keterlibatan masyarakat dan reformasi tingkat lokal. Ruang-ruang sipil lokal ini bergabung menjadi infrastruktur akar rumput organik untuk aksi kolektif. Awalnya kumpulan ini terlihat sebagai blok bangunan terpisah, tetapi kemudian berkumpul menjadi koalisi longgar yang beragam, yang pada akhirnya membentuk Revolusi Desember. Fokus lokal mereka membuat mereka dihormati oleh komunitas yang mereka layani dan membuat mereka lebih menarik daripada partai politik, yang dianggap tidak efektif dan tidak sinkron dengan keluhan rakyat. Mereka menawarkan peserta pengalaman langsung dengan tindakan kolektif, dan memperkenalkan mereka ke jaringan rekan-rekan yang memiliki motivasi yang sama. Beberapa kelompok juga menyelenggarakan pelatihan internal untuk relawan, yang memanfaatkan partisipasi politik dan pelatihan masyarakat sipil (Marovic dan Hayder, 2022).

Lalu, pada 6 April 2019, dimulai sebuah protes besar-besaran di markas tentara dan kediaman Presiden Bashir. Masalah ekonomi membawa banyak sekali masyarakat sipil Sudan dari semua lapisan masyarakat untuk turun protes ke jalan-jalan dengan dikomandoi organisasi demonstrasi oleh Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah kolaborasi civil society dari unsur profesional, seperti dokter, petugas kesehatan, dan pengacara. Pada aksi protes revolusi tersebut, persentase perempuan di antara para

pengunjuk rasa bahkan mencapai 70% dan mereka datang dari segala usia dan latar belakang. Mereka mengatakan mereka juga berdemonstrasi menentang sikap seksis Sudan dalam masyarakat Muslim konservatif di mana hukum Syariah diperlakukan. Para pengunjuk rasa di Sudan sebagian besar diisi oleh kaum muda, mencerminkan demografi negara tersebut. (BBC News, 2019).

Dini hari pada tanggal 11 April 2019, Kementerian Pertahanan Sudan membuat pengumuman menyebar ke seluruh kerumunan pengunjuk rasa yang berkemah di luar markas militer di Omdurman. Para pengunjuk rasa yang beraksi untuk memaksa Omar Bashir mundur dari jabatan Presiden tampaknya tahu secara intuitif apa yang akan terjadi. Karena pada akhirnya, Kementerian Pertahanan Sudan mengumumkan bahwa Omar Bashir telah mengundurkan diri setelah hampir tiga puluh tahun masa jabatannya sebagai Presiden. Menteri Pertahanan, Ahmed Awad Ibn Auf, mengumumkan tentara turun tangan untuk mengambil alih kendali setelah pengunduran diri Bashir. Lebih lanjut, dia mengindikasikan pemerintahan sementara akan dibentuk pada waktunya (LeRiche, 2019).

Setelah penggulingannya, para pemrotes terus berdemonstrasi menentang pengganti Bashir, Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf, yang mengambil alih sebagai pemimpin dewan transisi militer, karena dianggap sebagai alat dari rezim sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Ibn Auf mengundurkan diri dan kepala dewan militer baru, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mengambil alih situasi. Hebatnya, perkembangan ini didorong oleh masyarakat sipil di negara, yang otoritas pemerintah sebelumnya secara rutin menindak keras para protestan.

Keadaan darurat 3 bulan diumumkan, dengan jam malam untuk semua pusat kota yang dimulai dari pukul 22.00 hingga 04.00 setiap hari selama satu bulan. Menteri Pertahanan Sudan juga menjelaskan tentara akan memimpin penutupan kota dan pemerintah selama 24 jam sementara pengaturan transisi diselesaikan. Sementara Beredar laporan bahwa mantan Presiden Bashir dan sejumlah pengikutnya diasingkan dalam tahanan rumah. Tak lama setelah pengumuman tersebut, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) pun memberikan reaksi mereka sebagai pemimpin Gerakan masyarakat. SPA menyebut bahwa asosiasi dan pengunjuk rasa lainnya akan melanjutkan aksi duduk sampai transisi ke pemerintahan sipil diumumkan. Juru bicara SPA mengungkapkan bahwa dibutuhkan warga sipil untuk mengambil alih kekuasaan dari militer (LeRiche, 2019).

Revolusi Sudan dalam pelengseran rezim Bashir merupakan contoh luar biasa dari aksi masyarakat sipil dalam gerakan demokratisasi. Meskipun dalam keadaan yang

cukup membahayakan, berbagai aksi terorganisir yang dipimpin oleh Lembaga non-pemerintah seperti SPA akhirnya mampu membuat rezim Omar Bashir runtuh.

Demokratisasi Pasca Runtuhnya Rezim Omar Bashir

Omar Bashir dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan paling kejam. Proses revolusioner yang mengarah pada berakhirnya rezim ini memanfaatkan semangat dan usaha besar masyarakat sipil Sudan, yang di dalamnya termasuk kaum muda dan perempuan, yang terus berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik untuk negara mereka. Presiden Sudan Omar Bashir dicopot dari jabatannya pada April 2019 setelah berbulan-bulan terjadi protes di Sudan, dan mengakhiri dekade pemerintahan otokratis yang dipenuhi dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Bashir juga dituntut dengan dakwaan tindak korupsi dan dijatuhi hukuman dua tahun penahanan di Sudan. Bashir juga didakwa oleh jaksa Sudan dengan kejahatan pembunuhan dan merusak rezim konstitusional (Redress, 2021).

Meski rezim Bashir telah runtuh, tapi tak menghentikan berbagai perjuangan gerakan masyarakat sipil Sudan untuk terus mengawal proses demokratisasi agar tidak ada sisa-sisa kekuasaan rezim sebelumnya yang dapat kembali berkuasa. Dalam surat bersama, lebih dari 65 organisasi dan individu masyarakat sipil (termasuk REDRESS, Human Rights Watch, Amnesty International, The Sentry, ACJPS, Asosiasi Pengacara Darfur, dan SIHA) mendesak agar pemerintah menindaklanjuti komitmen memperdalam kerjasama dengan International Criminal Court (ICC) dengan mentransfer penyerahan Omar Bashir, Ahmed Haroun, dan Abdel Raheem Muhammed Hussein yang berada dalam tahanan Sudan ke Den Haag (Redress, 2021).

Pada tahun 2019, Bashir kehilangan dukungan militer, dan pasukannya berbalik menurunkannya dari kursi jabatan. Tuduhan genosida juga disematkan pada Bashir, karena ia menggunakan kekayaan alam berupa cadangan minyak dan gas bumi untuk menciptakan milisi yang lebih setia pada pengusaha dan investor dari dalam dan luar negeri demi melanggengkan jabatannya. Kemampuan finansial yang semakin melemah juga menjadi penyebab pecahnya Sudan dan Sudan Selatan hingga mengakibatkan protes besar pada tahun 2012 yang dipicu oleh gelombang demokrasi Arab Spring.

Setelah menjabat sebagai Presiden selama 30 tahun, kedudukan Omar sebagai pemimpin akhirnya runtuh dengan cara yang sama dengan saat rezimnya dimulai. Dalam pidatonya, Jederal Awad Ibn Auf menyatakan pergulingan rezim. Namun sejatinya, penggulingan rezim Omar Bashir didorong oleh gerakan masyarakat Sudan dari semua lapisan yang turun ke jalan selama berbulan-bulan, menuntut diakhirkannya kepemimpinan Omar Bashir. Dimulai dengan demonstrasi menentang kenaikan umum dalam biaya hidup, seperti harga pangan. Lalu berkembang menjadi masalah yang lebih

besar, seperti perubahan lingkungan politik, sebagai klimaks kemarahan rakyat atas penindasan rezim yang brutal. Dokter, guru, pengacara, dan profesional lainnya berpartisipasi dalam demonstrasi besar-besaran di Sudan.

Pasca jatuhnya Omar Bashir, Jenderal Awad Ibn Auf untuk sementara mengambil kekuasaan. Sebagai komite keamanan tertinggi, ia mengatakan bahwa Omar Bashir telah diasingkan ke tempat yang aman dan Jenderal Ibn Auf juga mengumumkan pula pembentukan transisi yang dipimpin militer untuk memerintah selama dua tahun. Jenderal Ibn Auf sendiri mengepalai badan yang terdiri atas angkatan bersenjata seperti polisi, militer dan badan keamanan lainnya.

Selama masa transisi, tanggung jawab untuk mengelola negara dilaksanakan oleh angkatan bersenjata. Namun, semua pernyataan itu menjadi bumerang untuknya karena rakyat memberi cemooh dan menuduh militer telah melakukan kudeta. Keadaan darurat akhirnya diumumkan serta diberlakukannya penutupan wilayah Sudan selama 24 jam termasuk pernyeberangan perbatasan sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan selama 3 bulan. Semua lembaga pemerintahan dibubarkan untuk meyakinkan rakyat bahwa pemilu yang bebas dan adil sedang dipersiapkan. Pengumuman tersebut dilontarkan setelah enam hari pasca protes besar anti-pemerintah di Khartoum (RA, Dermawan and Akim, 2019).

Demonstran ingin agar penurunan Omar dari kursi jabatannya dilakukan secara damai, namun SPA sebagai demonstran garda terdepan menolak metode Ibn Auf dengan menyebutnya sebagai kudeta militer. Namun, para pemimpin milter membuat perjanjian pembagian kekuasaan di Khartoum dan ini merupakan awal bagi kehidupan politik Sudan. Omar Bashir, mendekam di penjara sembari menunggu pengadilan atas tuduhan korupsi. Perayaan ini menjadi pesta bagi rakyat di seluruh penjuru negeri (Hassan dan Kodouda, 2019).

Namun, pada tanggal 3 Juni 2019, terjadi peristiwa penumpasan paling kejam terhadap para demostran di Khartoum. Tindakan tersebut dilakukan oleh Letnan Jenderal Mohamed Hamdan, yang merupakan seorang komandan paramiliter. Tragedi ini menewaskan sedikitnya 127 orang. Pasukan keamanan, termasuk milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), berusaha menyembunyikan pelanggaran mereka dengan membuang mayat yang ditimbang dengan batu bata di Sungai Nil, yang sekitar 40 di antaranya mengapung kembali ke permukaan dan ratusan orang telah ditangkap dan ditahan.

Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed membantu memberikan pejelasan dan menyelamatkan dialog perihal pembagian kekuasaan setelah aksi kejam yang dilakukan pada Juni 2019. Hamdan melakukan persetujuan dan bersedia menandatangani

perjanjian atas nama junta militer. Sementara Pasukan Kebebasan dan Perubahan yang diwakilkan oleh Ahmed al-Rabia menandatangani atas nama koalisi oposisi utama. Perjanjian ini menjadi gerbang awal bagi pemerintahan transisi Abdalla Hamdok sebagai pemimpin Sudan (RA, Dermawan and Akim, 2019).

Era baru pemerintahan ini diwariskan dalam keadaan ekonomi yang memprihatinkan dengan lonjakan inflasi, kelangkaan makanan, bahan bakar, listrik dan fasilitas umum yang rusak. Para ahli mengungkapkan bahwa Sudan dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan bantuan internasional untuk membangun stabilitas ekonomi guna mengantisipasi kerusuhan yang diperkirakan akan datang (RA, Dermawan and Akim, 2019).

Simpulan

Implementasi demokratisasi di negara Sudan dapat dilihat dari hasil tingginya partisipasi gerakan massa yang dilakukan secara kolektif, massif, dan secara terus menerus sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan otoriter Omar Bashir. Jatuhnya rezim Omar Bashir adalah kehendak dan buah dari peran seluruh rakyat Sudan. Masyarakat Sudan memahami bahwa situasi kekosongan kekuasaan adalah hal yang risikan dan dapat memicu konflik lainnya. Masa transisi dan pemilihan umum akan menjadi titik balik yang dapat mengubah masa depan demokrasi di negara Sudan. Ketika civil society telah menyadari pentingnya rasa keadilan, aman, dan kepercayaan terhadap pemerintah di sebuah negara, maka dengan sendirinya demokrasi akan terwujud.

Sudan dan Sudan Selatan masih harus melakukan berbagai negosiasi untuk dapat menyelesaikan konflik terkait sumber daya alam, ekspor pipa minyak dan wilayah perbatasan. Referendum Sudan Selatan disamping memberikan ‘kebebasan’ bagi masyarakat Sudan Selatan, namun juga tidak serta-merta menyelesaikan konflik yang telah berakar selama bertahun-tahun. Sudan, dengan konflik internal, kekosongan kekuasaan, dan kudeta rezim Bashir harus mampu membagi fokus antara menata ulang sistem pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, dan menyelesaikan konflik dengan Sudan Selatan secara adil dan berorientasi untuk mencapai perdamaian dalam jangka panjang bagi kedua negara.

Lebih jauh, perubahan-perubahan dari intens nya eskalasi politik menuju jalan demokratis adalah momentum untuk membuka prospek yang cerah bagi Sudan. Capaian ini merupakan sebuah manifestasi “people power” melalui suksesnya resistensi perlawanan yang dilakukan oleh berbagai koalisi elemen masyarakat sipil di Sudan. Dengan runtuhnya rezim otoriter Bashir bukan berarti sejarah tidak akan berulang kembali. Perlunya reformasi di dalam tubuh pemerintahan secara holistik sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses transisi yang menjunjung value-value demokrasi

guna membentuk pondasi yang kokoh di dalam mengarungi bahtera berbangsa dan bernegara yang lebih partisipatif dan humanis.

Berkaca dari kasus Sudan, Indonesia harus memetik hikmah dari Sudan. Secara “history tend to repeat” walaupun saat ini Indonesia dalam kondisi yang cukup stabil dan demokratif. Indonesia tidak dapat meremehkan people power, mengingat ketidakstabilan situasi politik dapat menjadi pemantik chaos yang lebih besar. Indonesia perlu terus membangun dan memupuk ruang-ruang demokrasi yang universal dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Adnan, A. H. (2006). Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur. Jurnal UNPAS. [online] Dalam: <https://adoc.pub/penyelaian-masalah-sudan-selatan-dan-krisis-di-darfur.html> [Diakses 20 April 2022].
- Assal, M., A., M. (2016). Civil society and peace building in Sudan: A critical look. Sudan Working Paper No. 2. [online] Dalam <https://www.cmi.no/publications/file/5807-civil-society-and-peace-building-in-sudan.pdf> [Diakses 16 Juni 2022].
- Ayin. (2019). Sudan’s Civil Society - Aspirant Revolutionaries Once More. [online] Dalam <https://ke.boell.org/en/2019/04/26/sudan%80%99s-civil-society-aspirant-revolutionaries-once-more> [Diakses 17 Juni 2022].
- Bassil, N., & Zhang, J. (2021). The post-Bashir era in Sudan: tragedy or remedy?. Australian Journal of International Affairs, [online] 75(3), 252-259. Dalam: <https://doi.org/10.1080/10357718.2021.1882385> [Diakses 23 April 2022].
- BBC News. (2019). Sudan coup: Why Omar al-Bashir was overthrown. [online] Dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-47852496> [Diakses 17 Juni 2022].
- Berry, L. B. (2015) Sudan, A Country Study. Library of Congress. Federal Research Division. Washington DC: GPO
- Browne, S. (2012). United Nations Development Programme and System (UNDP). New York: Routledge.
- Chun Leung, J. L., & Mohd Nor, M. R. (2021). Omar Al-Bashir: his Governance Crisis and the Outbreak of Revolution in Sudan. Geopolitics Quarterly, [online] 17 (Special Issue), 51-70. Dalam: http://journal.iag.ir/article_130167.html?lang=en [Diakses 23 April 2022].
- D'Angelo, G. (2010) Religion and the Secular State: Sudan National Report. Religion and the Secular State. [online] 645-667. Dalam:

- <https://www.strasbourgconsortium.org/content/blurb/files/Sudan%202014%20FINAL.pdf> [Diakses 21 April 2022].
- DW Indonesia. (2008). Profil Presiden Sudan Al Bashir. [online] Dalam: <https://www.dw.com/id/profil-presiden-sudan-al-bashir/a-3487002> [Diakses 14 Januari 2021]
- DW Indonesia. (2020). Trump to remove Sudan from US terror blacklist. [online] Dalam: <https://www.dw.com/en/trump-to-remove-sudan-from-us-terror-blacklist/a-55329299#:~:text=Sudan%20will%20be%20removed%20from,of%20attacks%20and%20their%20relatives> [Diakses 14 Januari 2021].
- Dyani-Mhango, N. (2017). South Africa's dilemma: immunity laws, international obligations, and the visit by Sudan's president Omar Al Bashir. Washington International Law Journal, [online] 26, 535. Dalam: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/pacrimlp26&div=2&id=&page=> [Diakses 22 April 2022].
- Grewal, H. (2021). How Democracy Can Win Out in Sudan. Journal of Democracy. [online] Dalam: <https://www.journalofdemocracy.org/how-democracy-can-win-out-in-sudan/> [Diakses 17 Juni 2022].
- Haris, A.M. (2020). Sudan Kini Sekuler. [online] UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam: <https://w3.uinsby.ac.id/sudan-kini-sekuler/> [Diakses 13 Januari 2021].
- Hassan, M., & Kodouda, A. (2019). Sudan's Uprising: The Fall of a Dictator. Journal of Democracy, [online] 30(4), 89-103. Dalam <https://www.journalofdemocracy.org/articles/sudans-uprising-the-fall-of-a-dictator/> [Diakses 16 Juni 2022].
- HILL, K., WHITNEY, J. B. dan TROTTER, R. R. (1961) 'Intravenous Hypertonic Urea in the Management of Acute Angle-Closure Glaucoma', Archives of Ophthalmology, 65(4), pp. 497–503. doi: 10.1001/archopht.1961.01840020499006.
- Leung, J., L., C., dan Nor, M., R., M. (2021). Omar Al-Bashir: his Governance Crisis and the Outbreak of Revolution in Sudan. Geopolitics Quarterly, [online] Volume: 17, Special Issue, Spring 2021 PP 51-70. Dalam http://journal.iag.ir/article_130167_a66d9ef4b219c7bfff4d3210824d38cc.pdf [Diakses 16 Juni 2022]
- LeRiche, M. (2019). The Fall of Omar Bashir in Sudan: A People's Revolution or a Changing of the Guard?. [online] Dalam <https://www.e-ir.info/2019/04/17/the-fall->

- of-omar-bashir-in-sudan-a-peoples-revolution-or-a-changing-of-the-guard/ [Diakses 17 Juni 2022].
- Madjid, N. (1996). Menuju Masyarakat Madani. dalam Jurnal Ulumul Qur'an, 7(2), 51-55.
- Marovic, M., dan Hayder, Z. (2022). Sowing the Seeds of Nonviolent Action in Sudan. Special Report No. 509, May 2022. [online] Dalam <https://www.usip.org/publications/2022/05/sowing-seeds-nonviolent-action-sudan> [Diakses 17 Juni 2022].
- Nassef, G. (2011). South Sudan: New currency for a new country. [online] BBC. Dalam: <https://www.bbc.com/news/av/world-africa-14238531> [Diakses 20 April 2022].
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RA, F. R., Dermawan, W. dan Akim (2019) ‘Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan’, Jurnal ICMES, 3(July), pp. 53–74.
- Redress. (2021). Civil Society Urges Sudanese Government to Transfer Former President Al-Bashir and Others to the International Criminal Court. [online] Dalam <https://redress.org/news/civil-society-urges-sudanese-government-to-transfer-former-president-al-bashir-and-others-to-the-international-criminal-court/> [Diakses 17 Juni 2022].
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Yogyakarta: Deepublish.
- Ryle, J. (2011). The Sudan Handbook. Woodbridge: James Currey. ISBN: 9781847010308
- Sulisworo, D. Wahyuningsih, T.D.B.A. (2016). Demokrasi: Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012. Vatandaşlık Bilgisi, pp. 177–201. [online] Dalam: <https://doi.org/10.14527/9786053184034.07> [Diakses 20 April 2022].
- UNDP. (no date). UNDP in Sudan. [online] Dalam: <https://www.sd.undp.org/> [Diakses 21 April 2022].
- Wahiduddin (2020). ‘Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Omar Bashir’, Nady Al-Adab, 17(1), p. 50. doi: 10.20956/jna.v17i1.10086.